Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

OPTIMALISASI INDUSTRI MAKANAN HALAL DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR (KASUS DI KAWASAN BTP)

Juanda Zulqadri[1], Darnayanti[2], Imaniar Nur Fajriany S[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam AGH. Sanusi Baco[1,2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan[3]
Email: juandazulqadri97@gmail.com[1], idha.dharna@gmail.com[2], imaniarnfs12@gmail.com[3]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi industri makanan halal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, khususnya di Kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Makanan halal memiliki potensi besar dalam perekonomian daerah, mengingat permintaan yang tinggi dari pasar domestik maupun internasional, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kota Makassar. Namun, sektor industri makanan halal di Kawasan BTP masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas produksi, rendahnya kapasitas produksi, dan kurangnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri ini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, pelaku industri makanan halal, dan ahli ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan observasi langsung di Kawasan BTP untuk mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku industri makanan halal. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat potensi besar di Kawasan BTP, kontribusi sektor ini terhadap PAD Kota Makassar masih terbatas. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengoptimalan sektor ini antara lain peningkatan infrastruktur, dukungan kebijakan yang lebih kuat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan distribusi produk halal.
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan fasilitas produksi, mempercepat proses sertifikasi halal, memberikan insentif kepada pelaku industri makanan halal, serta menyediakan pelatihan untuk UMKM di sektor ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri makanan halal di Kawasan BTP dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD dan mendorong perekonomian daerah secara berkelanjutan.
Kata kunci: **Industri makanan halal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), UMKM**

Abstract
This study aims to analyze the optimization of the halal food industry in supporting the increase of Regional Original Revenue (PAD) in Makassar City, especially in the Bumi Tamalanrea Permai (BTP) area. Halal food has great potential in the regional economy, given the high demand from both domestic and

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

international markets, especially in areas with a Muslim majority population such as Makassar City. However, the halal food industry sector in the BTP Area still faces various obstacles, such as limited production facilities, low production capacity, and lack of policies that support the development of this industry.
This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews with local governments, halal food industry players, and economists. In addition, this study also conducts direct observations in the BTP Area to identify the potentials and obstacles faced by halal food industry players. Based on the results of the analysis, it was found that although there is great potential in the BTP Area, the contribution of this sector to the Makassar City PAD is still limited. Some of the opportunities that can be used to optimize this sector include improving infrastructure, stronger policy support, and utilizing digital technology in the marketing and distribution of halal products.
This study recommends that local governments improve production facilities, accelerate the halal certification process, provide incentives to halal food industry players, and provide training for SMEs in this sector. With these steps, it is hoped that the halal food industry in the BTP Area can contribute more to PAD and encourage the regional economy in a sustainable manner.
Keywords**: **Halal food industry, Regional Original Revenue, SMEs

A. Pendahuluan

Industri makanan halal memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di tingkat dunia, pasar makanan halal diperkirakan mencapai nilai triliunan dolar, dengan pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Permintaan terhadap produk halal tidak hanya berasal dari negara-negara Islam, namun juga dari negara-negara non-Muslim yang mulai memperhatikan konsumsi halal karena alasan kesehatan dan etika. Hal ini menjadikan industri makanan halal sebagai sektor yang berpotensi besar dalam perekonomian global. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report* (2023) mencatat pasar produk halal dunia bernilai USD 7,1 triliun, dengan sektor makanan halal menyumbang 63% dari total pangsa pasar [1].

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, industri makanan halal juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi strategis, namun kontribusinya baru 3,8% terhadap pasar global (BI, 2023). Namun, meskipun potensi besar, pemanfaatan industri makanan halal di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar, belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tingkat regional, Kota Makassar sebagai gerbang ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki 178 UMKM bersertifikat halal (BPJPH, 2023), namun belum dimanfaatkan secara

[1] Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428, https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) [2].

Di Kota Makassar, meskipun ada potensi yang besar di sektor industri makanan halal, kontribusi sektor ini terhadap PAD belum maksimal. Kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai) yang dikenal memiliki potensi industri makanan halal juga belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah kurangnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri makanan halal, terbatasnya promosi dan pemasaran produk halal dari UMKM, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendukung industri makanan halal sebagai bagian dari perekonomian daerah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi potensi industri makanan halal di Kota Makassar, khususnya di Kawasan BTP, dalam mendukung peningkatan PAD. Diperlukan kajian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana sektor ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sektor industri makanan halal, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sektor ini.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kontribusi industri halal terhadap perekonomian daerah. Samsul Arifai dalam jurnal *The Role Of The Halal Industry In Improving The Economy And Alleviating Poverty Post-Covid-19 Pandemic In Indonesia* mengungkapkan bahwa sektor industri halal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun pengelolaannya masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal kebijakan dan pengembangan UMKM [3]. Selain itu, Lubis dalam penelitian mereka The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector menyatakan bahwa optimalisasi industri makanan halal dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan PAD di daerah-daerah dengan potensi industri halal yang besar [4].

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam potensi dan pengoptimalan industri makanan halal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, khususnya di Kawasan BTP. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menganalisis secara rinci fenomena

[2] Bahtiar Adamsah and Eka Subakti, "Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth," *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75.

[3] Samsul Arifai, "The Role of the Halal Industry in Improving the Economy And," *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023): 21–28.

[4] Rahmat Lubis and Fatwa Syibromalisi, "The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4 (December 30, 2023): 182–96, https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6465.

yang terjadi di kawasan tersebut, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk pengembangan industri halal di tingkat daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan BTP (Bumi Tamalanrea Permai), Kota Makassar, yang dipilih karena kawasan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan industri makanan halal, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kawasan ini juga merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor makanan halal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama; 1)Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam industri makanan halal, seperti pelaku industri (pengusaha makanan halal, pemilik restoran, UMKM), pemerintah daerah (Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan UKM), serta ahli ekonomi dan kebijakan publik.Observasi dilakukan di Kawasan BTP untuk memantau secara langsung aktivitas industri makanan halal yang ada, serta melihat kondisi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung industri ini; 2)Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan tahunan pemerintah daerah, data PAD Kota Makassar, dan laporan terkait industri makanan halal. Data sekunder juga diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu.

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan Wawancara Mendalam. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam dan spesifik mengenai kondisi industri makanan halal di Kawasan BTP, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri ini. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam industri makanan halal, seperti; 1)Pelaku industri makanan halal di Kawasan BTP (UMKM, restoran, dan produsen makanan halal); 2)Pemerintah daerah (terkait kebijakan dan regulasi yang mendukung atau menghambat perkembangan industri halal).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Industri Makanan Halal dalam Perekonomian Daerah

Secara umum, sektor industri makanan halal memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri makanan halal, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, pengoptimalan sektor ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kota Makassar. Sebagai kota dengan mayoritas penduduk Muslim, Kota Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi dan distribusi makanan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

halal, baik untuk pasar domestik maupun internasional [5].

a. Potensi Penciptaan Lapangan Kerja
   Industri makanan halal dapat memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, baik di sektor produksi, distribusi, maupun pemasaran. Dengan berkembangnya industri makanan halal, permintaan terhadap tenaga kerja di sektor ini akan meningkat. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Makassar, terutama di kalangan masyarakat muda yang membutuhkan pekerjaan. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal akan membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam industri ini, dari yang bersifat teknis hingga manajerial [6].
   Selain itu, sektor ini dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Usaha makanan halal yang berbasis rumahan atau UMKM akan berkembang pesat jika didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah. Hal ini akan menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mereka, serta menyerap tenaga kerja dalam proses produksinya [7].
b. Pengurangan Ketergantungan pada Sektor Lain
   Pengembangan industri makanan halal yang optimal juga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi daerah pada sektor lain yang lebih terbatas, seperti pertanian atau sektor industri yang belum maksimal. Sebagai contoh, Kawasan BTP yang berada di Kota Makassar, memiliki potensi untuk menjadi pusat distribusi makanan halal yang menghubungkan sektor-sektor lain, seperti pertanian, dengan industri pengolahan makanan. Dengan memaksimalkan produk lokal sebagai bahan baku untuk industri makanan halal, daerah tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
   Salah satu dampak positif dari perkembangan industri makanan halal adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan produk bernilai tambah, industri makanan halal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang usaha dan pekerjaan. Pendapatan dari

[5] Taufik Hidayat, Ahmad Juwaini, and Putu Rahwidhiyasa, "Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia," *KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2023, 4.

[6] Rusnathul Amiah, Andi Elviani, and Desy Rahmawati Anwar, "Efektivitas Sertifikasi Kepercayaan Konsumen Halal Dalam Meningkatkan," *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 1560–65.

[7] Ica Camelia et al., "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1474–84.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

sektor ini juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah [8]. Peningkatan aktivitas ekonomi dalam industri makanan halal di Kota Makassar juga berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Hal ini dapat tercapai melalui peningkatan jumlah pelaku usaha yang membayar pajak, baik dari usaha kecil maupun usaha besar. Selain itu, peningkatan ekspor produk halal dari Kota Makassar ke luar negeri akan memperbesar sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lokal.

d. Potensi Peningkatan Ekspor dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
Dengan peningkatan standar produksi dan pengolahan makanan halal yang memenuhi kriteria internasional, Kawasan BTP berpotensi untuk menjadi pusat ekspor produk makanan halal. Permintaan global untuk makanan halal, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa negara Eropa, dapat menjadi peluang besar bagi industri makanan halal di Makassar. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Kota Makassar dalam pasar internasional, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas jaringan distribusi. Sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi daerah, pengembangan industri makanan halal dapat mengurangi ketergantungan Kota Makassar pada sektor-sektor yang lebih konvensional, seperti perdagangan dan jasa. Sektor makanan halal yang berkelanjutan dapat mendorong perekonomian daerah untuk lebih resilient terhadap fluktuasi ekonomi global.

e. Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kualitas Produk
Kota Makassar, dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama bahan baku untuk produk makanan halal, seperti pertanian, perkebunan, dan hasil laut, memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan sektor ini. Dengan menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas, industri makanan halal di Kawasan BTP dapat menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas produk makanan halal akan mempengaruhi reputasi produk tersebut di pasar lokal maupun internasional. Jika kualitas produk dapat dijaga dan dikembangkan, maka produk-produk dari Kawasan BTP memiliki peluang untuk bersaing dengan produk makanan halal internasional, yang pada gilirannya akan memperbesar kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

2. Potensi Pengoptimalan Industri Makanan Halal di Kawasan BTP

Kawasan BTP, sebagai kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri makanan halal, perlu dioptimalkan melalui

[8] Muhammad Sofwan Jauhari, "Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 105–22, https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

berbagai strategi. Potensi besar pasar makanan halal di Kota Makassar harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan fasilitas infrastruktur, promosi produk, serta akses pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyediakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam hal pengelolaan bisnis dan pemasaran.

a. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Produksi dan Distribusi

   Peningkatan infrastruktur merupakan aspek utama dalam mengoptimalkan industri makanan halal di Kawasan BTP. Infrastruktur yang memadai akan mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas distribusi produk mereka. Misalnya, dengan penyediaan fasilitas produksi yang memenuhi standar halal dan sanitasi yang tinggi, industri makanan halal di Kawasan BTP akan dapat menghasilkan produk yang lebih aman dan berkualitas. Selain itu, distribusi yang efisien menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mengoptimalkan sektor makanan halal. Infrastruktur logistik yang lebih baik, seperti sistem transportasi yang efisien dan jaringan distribusi yang luas, akan mempermudah pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan infrastruktur ini dengan memperhatikan kebutuhan pelaku industri halal, terutama dalam hal akses ke pusat distribusi dan pasar.

b. Pemasaran dan Promosi Produk Makanan Halal

   Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku industri makanan halal di Kawasan BTP adalah rendahnya tingkat pemasaran dan promosi produk. Banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan pemasaran konvensional dan terbatas pada pasar lokal. Untuk itu, pengoptimalan sektor ini juga membutuhkan promosi yang lebih agresif, terutama untuk memperkenalkan produk makanan halal dari Kawasan BTP ke pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah, bersama dengan pelaku industri, perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti melalui kampanye promosi produk halal yang berbasis digital. Media sosial, e-commerce, dan platform pemasaran digital lainnya dapat menjadi saluran yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk halal ke konsumen yang lebih luas. Pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam memasarkan produk mereka

   Selain itu, partisipasi dalam pameran industri makanan halal, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menjadi sarana yang baik untuk memperkenalkan produk dari Kawasan BTP.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

Pameran ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk, tetapi juga membuka peluang untuk menjalin kemitraan dan jaringan distribusi yang lebih luas.

c. Pengembangan Kapasitas UMKM dalam Pengelolaan Bisnis
Pelaku industri makanan halal di Kawasan BTP, sebagian besar adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dalam hal manajerial dan pengelolaan bisnis. Untuk itu, pengembangan kapasitas pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pembinaan sangat diperlukan. Pelatihan dalam bidang pengelolaan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran produk akan membantu pelaku usaha untuk mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau universitas untuk menyediakan program-program pelatihan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM di Kawasan BTP. Selain itu, pembinaan dalam hal kualitas produk dan pengendalian mutu juga penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

d. Peningkatan Akses Pasar dan Ekspansi Pasar Ekspor
Akses ke pasar yang lebih luas merupakan salah satu faktor kunci dalam pengoptimalan industri makanan halal di Kawasan BTP. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pelaku industri makanan halal untuk memperluas jaringan distribusi mereka, baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu cara untuk meningkatkan akses pasar adalah dengan menjalin kemitraan dengan distributor besar atau perusahaan pengecer yang memiliki jaringan yang lebih luas. Di sisi lain, untuk menembus pasar ekspor, pelaku industri makanan halal di Kawasan BTP perlu memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, pengemasan, dan sertifikasi halal. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga terkait, dapat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal yang diakui internasional, seperti yang diterapkan oleh negara-negara pengimpor makanan halal besar seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa. Selain itu, dukungan berupa promosi produk halal di luar negeri, melalui pameran internasional atau platform perdagangan internasional, dapat mempercepat ekspansi pasar ekspor.

e. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Sektor Industri Makanan Halal
Salah satu faktor penting dalam pengoptimalan industri makanan halal di Kawasan BTP adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung sektor ini. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dan industri makanan halal, seperti pemberian insentif fiskal atau non-fiskal,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

seperti subsidi untuk pelaku industri yang memenuhi standar produksi halal atau penyediaan fasilitas produksi yang lebih baik. Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah insentif untuk penelitian dan pengembangan produk, yang dapat membantu pelaku industri untuk mengembangkan produk makanan halal yang inovatif dan menarik bagi pasar. Selain itu, kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga riset akan mempercepat inovasi dan pengembangan sektor industri makanan halal [9].

3. Kebijakan Pemerintah yang Diperlukan

Pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri makanan halal. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif bagi pelaku industri makanan halal yang memenuhi standar kualitas produk dan memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, kebijakan mengenai pelatihan dan pembinaan untuk UMKM dapat membantu meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor ini [10].

a. Pemberian Insentif untuk Pelaku Industri Makanan Halal

Pemberian insentif merupakan langkah yang efektif untuk mendorong pengembangan industri makanan halal di Kawasan BTP. Insentif ini bisa berbentuk berbagai macam, mulai dari pengurangan pajak daerah bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kualitas dan sertifikasi halal, hingga subsidi untuk pembelian peralatan produksi yang memenuhi standar keamanan pangan. Insentif ini akan membantu meringankan beban biaya operasional bagi pelaku UMKM yang mungkin kesulitan dalam mengakses pembiayaan eksternal. Insentif dapat diberikan bagi pelaku industri yang berkomitmen untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam proses produksi. Dengan memberikan insentif kepada mereka yang memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan, pemerintah dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan inovatif [11].

Pemberian insentif ini juga bisa diatur melalui program yang mendukung sertifikasi halal yang lebih mudah diakses oleh pelaku industri. Sertifikasi halal, yang merupakan salah satu elemen penting dalam industri makanan halal, sering kali memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Dengan insentif tersebut, pelaku

[9] Danarti Hariani et al., "Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia Inovatif Dan Unik . Bisnis Kuliner UMKM Memberikan Kontribusi Besar Dalam Penciptaan Industri Makanan Halal Di Indonesia Sudah Ada Sejak Akhir Tahun 1976 Ditandai Kesehatan . Indonesia Ada," *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin* 5, no. 2 (2024): 374–90.

[10] Annisya Nurul Latif et al., "Mengatasi Tantangan Dan Memanfaatkan Peluang Industri Halal Kosmetik Dan Obat-Obatan Menuju Wajib Halal 2026 : Analisis," *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 2 (2024): 146–55.

[11] Meidila Anggita et al., "Penerapan Green Practice Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) Kuliner Di Kota Bandung," *El Mal* 6, no. 3 (2025): 1963–71.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

usaha dapat memperoleh sertifikasi halal yang lebih cepat dan terjangkau, yang pada gilirannya akan memperbesar daya saing produk mereka di pasar lokal maupun internasional [12].

b. Pelatihan dan Pembinaan untuk UMKM

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di sektor makanan halal adalah keterbatasan pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan pengelolaan kualitas produk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang fokus pada pelatihan dan pembinaan untuk UMKM sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau perusahaan konsultan untuk menyelenggarakan program pelatihan yang mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan teknik pemasaran digital [13]. Pelatihan tentang pemasaran digital sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar produk makanan halal. Dengan memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Program pembinaan juga harus mencakup pembelajaran tentang kualitas produk, termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian kualitas, sertifikasi halal, dan standar produksi yang harus dipenuhi untuk memasuki pasar yang lebih besar [14].

Selain itu, pelatihan tentang kewirausahaan dan inovasi produk dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan produk makanan halal yang lebih beragam dan menarik bagi konsumen. Pelaku UMKM yang dilengkapi dengan keterampilan manajerial yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang pasar, akan lebih mampu bersaing dan bertahan dalam industri yang semakin kompetitif [15].

c. Penyediaan Akses Pembiayaan yang Mudah

Selain pelatihan dan insentif, salah satu kebijakan penting yang diperlukan adalah penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku industri makanan halal. Banyak UMKM yang menghadapi kendala besar dalam mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan formal karena kurangnya

[12] Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68, https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.

[13] Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, "ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN UMKM HALAL DALAM ERA PASAR NASIONAL," *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2020): 105–30.

[14] Syafiatul Kiromah and Nuryami, "STRATEGI DIGITAL DALAM PEMASARAN PRODUK UMKM DI DESA KROPAK : PELUANG SERTA TANTANGAN," *Jurnal BUDIMAS* 6, no. 3 (2024): 1–23.

[15] Rd. Heri Solehudin et al., "Strategi Pemasaran Online Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) CeuEm Frozen Food Di Beji Depok Dalam Menghadapi Persaingan Usaha," *Jurnal SOLMA* 12, no. 3 (2023): 1326–36, https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.12671.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

jaminan atau pemahaman tentang prosedur pengajuan pinjaman. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan program pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM di sektor makanan halal [16]. Selain itu, penyediaan dana hibah atau pinjaman berbunga rendah untuk pelaku industri yang memenuhi kriteria tertentu, seperti penerapan standar halal dan keberlanjutan, dapat membantu mempercepat pengembangan usaha mereka. Melalui kebijakan pembiayaan yang lebih mudah, pelaku industri makanan halal di Kawasan BTP akan lebih mudah untuk mengembangkan kapasitas produksi mereka dan memperluas pasar.

d. Fasilitasi Akses Pasar Domestik dan Internasional

Untuk memperbesar kontribusi industri makanan halal terhadap perekonomian daerah, kebijakan yang dapat memperluas akses pasar domestik dan internasional sangat diperlukan. Pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka melalui partisipasi dalam pameran dan konferensi industri makanan halal baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan visibilitas produk lokal, tetapi juga membuka peluang kemitraan dengan distributor besar dan pemasok internasional [17]. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara pengimpor makanan halal utama untuk mempermudah proses ekspor dan sertifikasi internasional. Dengan memperluas akses pasar, produk makanan halal dari Kawasan BTP tidak hanya akan memenuhi permintaan lokal, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional yang sangat besar.

e. Kebijakan Penguatan Rantai Pasok dan Standarisasi Produk

Penguatan rantai pasok dan standarisasi produk makanan halal adalah aspek penting dalam kebijakan pengembangan industri makanan halal. Pemerintah daerah dapat mendukung pengembangan rantai pasok yang lebih efisien dengan memfasilitasi kemitraan antara petani lokal, pengolah makanan, dan distributor. Hal ini akan memastikan bahwa bahan baku makanan halal yang digunakan dalam produksi memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan[18]. Selain itu, pemerintah dapat mendorong perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan UMKM untuk menciptakan standar yang lebih tinggi dalam kualitas dan pengolahan produk. Inisiatif ini

[16] Endy Muhammad Astiwara, "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN," *JURNAL PAPATUNG* 8, no. 1 (2025): 13–28.

[17] Iin Khairunnisa et Al., *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 2022.

[18] Aslikhah Aslikhah and Alimatul Faridah, "Strategi Penguatan Halal Supply Chain Di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy," *Jurnal Istiqro* 7, no. 1 (2021): 95, https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2416-2429

akan meningkatkan daya saing produk makanan halal, baik di pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat posisi industri makanan halal sebagai sektor yang dapat diandalkan dalam perekonomian daerah [19].

D. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan pengoptimalan industri makanan halal di Kawasan BTP, Kota Makassar, dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa industri makanan halal di Kota Makassar, khususnya di Kawasan BTP, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PAD masih terbatas, dan pengoptimalkan sektor ini memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan industri makanan halal di Kawasan BTP antara lain:

1. Potensi Pasar: Kota Makassar memiliki populasi mayoritas Muslim, sehingga permintaan produk makanan halal sangat besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Peluang pasar internasional untuk produk halal Indonesia semakin terbuka seiring dengan meningkatnya permintaan global.
2. Kendala Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan industri makanan halal. Kawasan BTP masih membutuhkan fasilitas produksi yang lebih baik, serta sistem distribusi yang efisien untuk memperluas jangkauan pasar.
3. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung: Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung sektor makanan halal sangat diperlukan, seperti pemberian insentif untuk pelaku usaha yang memenuhi standar kualitas, penyediaan pelatihan untuk UMKM, serta memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
4. Pengembangan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM di Kawasan BTP sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan bisnis dan pemasaran produk. Dengan peningkatan kapasitas SDM, pelaku industri dapat bersaing lebih baik dan mengelola bisnis mereka secara lebih profesional.
5. Pemanfaatan Teknologi: Teknologi, terutama teknologi digital, dapat memainkan peran penting dalam pemasaran produk makanan halal dan meningkatkan efisiensi produksi. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial dapat

[19] Anis Supriyatin et al., "Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal Dalam Mendukung Pengembangan IKM : Studi Kasus Safe N Lock Sidoarjo , Jawa Timur," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024).

memperluas pasar produk makanan halal dan mempermudah distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Adamsah, Bahtiar, and Eka Subakti. "Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth." *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75.

Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman. "Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional." *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking* 2, No. 2 (2020): 105–30.

Amiah, Rusnathul, Andi Elviani, and Desy Rahmawati Anwar. "Efektivitas Sertifikasi Kepercayaan Konsumen Halal Dalam Meningkatkan." *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 1560–65.

Anggita, Meidila, Natalia Christi, Ignasia Tiffani, and Maria Merry Marianti. "Penerapan Green Practice Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) Kuliner Di Kota Bandung." *El Mal* 6, no. 3 (2025): 1963–71.

Arifai, Samsul. "The Role of the Halal Industry in Improving the Economy And." *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 1 (2023): 21–28.

Aslikhah, Aslikhah, and Alimatul Faridah. "Strategi Penguatan Halal Supply Chain Di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy." *Jurnal Istiqro* 7, no. 1 (2021): 95. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724.

Astiwara, Endy Muhammad. "Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Industri Pangan." *Jurnal Papatung* 8, no. 1 (2025): 13–28.

Camelia, Ica, Listian Indriyani Achmad, MH Ainulyaqin, S Edy, and Universitas Pelita Bangsa. "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1474–84.

Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.

Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146.

Hariani, Danarti, Fakultas Ekonomi, Universitas Mohammad, and Husni Thamrin. "Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia Inovatif Dan Unik . Bisnis Kuliner UMKM Memberikan Kontribusi Besar Dalam Penciptaan Industri Makanan Halal Di Indonesia Sudah Ada Sejak Akhir Tahun 1976 Ditandai Kesehatan . Indonesia Ada." *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin* 5, no. 2 (2024): 374–90.

Hidayat, Taufik, Ahmad Juwaini, and Putu Rahwidhiyasa. "Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia." *KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2023, 4.

Jauhari, Muhammad Sofwan. "Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk

Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 105–22. https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495.

Khairunnisa, Iin, dwi harmadji, Rida Ristiyana, Budi Harto, Ani Mekaniwati, warkianto widjaja, natalia malau, et al. *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, 2022.

Kiromah, Syafiatul, And Nuryami. "Strategi Digital Dalam Pemasaran Produk Umkm Di Desa Kropak : Peluang Serta Tantangan." *Jurnal Budimas* 6, No. 3 (2024): 1–23.

Latif, Annisya Nurul, Marlini Alianita, Wiwit Musaadah, and Rahmat Hidayat. "Mengatasi Tantangan Dan Memanfaatkan Peluang Industri Halal Kosmetik Dan Obat-Obatan Menuju Wajib Halal 2026 : Analisis." *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 2 (2024): 146–55.

Lubis, Rahmat, and Fatwa Syibromalisi. "The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4 (December 30, 2023): 182–96. https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6465.

Solehudin, Rd. Heri, Rudy Gunawan, Ulumuddin Ulumuddin, Abdul Kodir, Aqiq Muttaqin, Lalu M. Tolkhah, and Choirul Mahfuddin. "Strategi Pemasaran Online Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) CeuEm Frozen Food Di Beji Depok Dalam Menghadapi Persaingan Usaha." *Jurnal SOLMA* 12, no. 3 (2023): 1326–36. https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.12671.

Supriyatin, Anis, Alifudin Al Azlansyah, Nanda Hanifah, and Naerul Edwin Kiky. "Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal Dalam Mendukung Pengembangan IKM : Studi Kasus Safe N Lock Sidoarjo , Jawa Timur." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2024).